

Tabel 3.6

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI RPJMD : Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua				
MISI 2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat				
Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	1. Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	1. Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>revenue mobilization</i>)	1. Meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah 2. Menurunkan tindak penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah; 3. Meningkatkan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain; 4. Meningkatkan standart layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 5. Pengawasan Internal Yang Baik 6. Meningkatnya kemampuan (ability) atau kapasitas personil pengawasan 7. Meningkatnya Penerapan Prosedur Pelayanan yang baik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan



				i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	2. Meningkatnya	2. Indeks Kemandirian	1. Meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



	Kemandirian Fiskal Daerah	Fiskal Daerah	2. Menurunkan tindak penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah; 3. Meningkatkan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain; 4. Meningkatkan standart layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 5. Pengawasan Internal Yang Baik 6. Meningkatnya kemampuan (ability) atau kapasitas personil pengawasan 7. Meningkatnya Penerapan Prosedur Pelayanan yang baik	2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : k. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah m. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah n. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah o. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah p. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah q. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi r. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan s. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak t. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : o. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; p. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; q. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; r. Penyediaan Sarana dan Prasarana
--	------------------------------	---------------	--	--

				Pengelolaan Pajak Daerah; s. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; t. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; u. Penetapan Wajib Pajak Daerah; v. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; w. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; x. Penagihan Pajak Daerah; y. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; z. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; aa. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bb. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. 4.
	2. Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	3. Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan; 2. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 4. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 5. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 6. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan pendapatan daerah.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman



				Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
--	--	--	--	---

				m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	4. Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	4. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan; 2. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 4. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 5. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 6. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan pendapatan daerah.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

				3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	5. Meningkatnya kontribusi PAD	6. Persentase PAD terhadap	1. Berkurangnya angka koreksi PAD Terhadap Belanja APBD yang pendanaannya bersumber pada	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



	terhadap Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	PAD; 2. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 5. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 6. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 7. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan pendapatan daerah.	2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
--	----------------------------------	-------------------	--	---

				: a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
--	--	--	--	---



--	--	--	--	--



